



## **PENGARUH SOSIALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK DI KECAMATAN LAGE KABUPATEN POSO**

**Imanuel N. Tadanugi**

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sintang Maroso, Indonesia

---

### **Info Artikel**

*Sejarah Artikel*

---

*Kata Kunci:*

Pembangunan Politik,  
Sosialisasi, Pemilu

---

### **Abstrak**

Proses pelaksanaan pemilihan umum secara langsung di Kecamatan Lage adalah wujud dari berlakunya Undang – Undang 32 tahun 2004 dimana masyarakat di beri kebebasan untuk dapat memilih secara langsung para calon anggota legislatif di tingkat nasional dan daerah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sosialisasi terhadap pemnbangunan politik di kecamatan Lage Kabupaten Poso.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan fakta dan data. sasaran dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang terdaftar dalam DPT di Kecamatan Lage Kabupaten Poso. berjumlah 13015 sedangkan sampel yang di ambil hanya 40 orang berdasarkan Claster dari masig-masing desa.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh peningkatan sosialisasi politik terhadap pembangunan politik di kecamatan Lage yaitu yang berpengaruh ada 27 orang (67,5%), 8 orang (20%) menyatakan peningkatan sosialisasi politik cukup berpengaruh dalam pembangunan politik, dan 5 orang (12,5%) menyatakan peningkatan sosialisasi politik kurang berpengaruh dalam pembangunan politik. Ini menandakan bahwa pengaruh peningkatan sosialisasi politik terhadap pembangunan politik sangat penting agar masyarakat nantinya sudah dapat menyesuaikan dirinya untuk proses-proses mengenai partisipasi politik atau dalam agenda pemilihan umum/pilkada kedepan.

## PENDAHULUAN

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia para *Founding Fathers* telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, seperti yang secara jelas terlihat dalam ketentuan pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya dikaitkan dengan prinsip negara kesatuan yang dianut, maka negara Republik Indonesia mewujudkan diri sebagai negara kesatuan yang di desentralisasikan.

Cita desentralisasi ini senantiasa menjadi bagian dalam praktek pemerintah negara sejak berlakunya UUD 1945, terus memasuki era konstitusi RIS, UUDS 1950 sampai pada era kembali ke UUD 1945 yang dikukuhkan lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Garis perkembangan sejarah tersebut membuktikan bahwa cita desentralisasi senantiasa dipegang teguh oleh negara Republik Indonesia, sekalipun dari satu periode ke periode lainnya terlihat adanya perbedaan dalam intensitasnya.

Dianutnya sistim ini dalam penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan pada prinsip pemencaran kekuasaan yang dilaksanakan melalui tiga asas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan guna pengembangan demokrasi di / dari bawah.

Sebagai konsekuensinya dianutnya sistem / asas ini, dibentuklah unit-unit pemerintahan setempat yang disebut daerah otonom, yakni daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar kebijaksanaan dan inisiatif, pembiayaan dan dilakukan oleh perangkat daerah sendiri dan diwujudkan dengan lahirnya berbagai peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pemerintahan daerah seperti UU NO. 5 Tahun 1974 mengatur hubungan pusat dan daerah tentang pokok-pokok pemerintahan daerah tetapi di dalam prakteknya yang terjadi adalah sentralisasi di era Orde Baru, lalu disusul dengan periode Reformasi yang dimulai pada tahun 1998, seiring dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru, pada periode ini semangat desentralisasi, demokratisasi dan globalisasi yang dibawa oleh gerakan Reformasi menjalar ke semua sektor pembangunan termasuk di bidang politik, dalam rangka untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan

kekuatan-kekuatan sosial politik pada era Reformasi maka telah dilakukan perubahan / amandemen UUD 1945 oleh MPR dengan maksud lebih memantapkan upaya-upaya dalam mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.

Salah satu produk Undang-Undang yang dihasilkan oleh MPR tentang Pemerintahan Daerah adalah UU No. 22 Tahun 1999, namun dalam pelaksanaannya juga telah menimbulkan dampak negatif antara lain ; tampilnya Kepala Daerah sebagai raja-raja kecil, KKN, sengketa wilayah, retribusi dan pajak daerah yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi, sengketa kewenangan dan lain sebagainya. Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada UU No. 22 Tahun 1999 maka penyempurnaan tersebut dilaksanakan melalui UU No. 32 Tahun 2004 dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dimana kinerja penyelenggaraan otonomi daerah yaitu pemerintahan daerah dan DPRD harus menjamin adanya hubungan yang serasi antara masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD serta harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat luas yang sesuai dan mengacu pada GBHN tahun 1999.

Untuk mewujudkan / merealisasikan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan tujuan dari UU No. 32 Tahun 2004 yang sesuai dengan GBHN Tahun 1999 adalah bukan hanya semata-mata tanggung jawab dari pemerintah daerah saja, tetapi juga berada di pundak masyarakat secara keseluruhan. Artinya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan warga masyarakat mempunyai sikap / semangat terhadap persamaan dan kualitas. Persamaan ini mencakup pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif seperti berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, berpartisipasi dalam proses pelaksanaan keputusan, berpartisipasi dalam menikmati keputusan, berpartisipasi dalam mengevaluasi keputusan dan lain sebagainya di dalam kehidupan politik serta untuk direkrut guna menempati posisi-posisi politik dan persamaan dalam bidang hukum lalu masyarakat juga dapat melihat dan menilai dari kapasitas sistem politik yang ada lewat fungsi-fungsinya di dalam berdaya guna dan berhasil guna dengan

menggunakan prinsip-prinsip dan standar-standar yang rasional dan masyarakat juga harus mampu dalam melihat dan mengetahui proses diferensiasi serta spesialisasi daripada fungsi-fungsi politik yang ada. Semua itu adalah beberapa tolak ukur yang bisa dijadikan penilaian di dalam menyukseskan Program Pembangunan Nasional khususnya di bidang politik, tetapi semua itu dapat dicapai melalui peranan pemerintah di dalam melakukan sosialisasi, pembinaan, pendidikan dan komunikasi serta mengarahkan kultur / budaya masyarakat ke arah yang lebih demokratis.

Jadi sejauh mana proses sosialisasi politik yang demokratis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membentuk pemahaman, sikap dan orientasi dasar politik masyarakat desa dengan mengadakan pembinaan dan pendidikan politik serta mengarahkan budaya politik masyarakat daerah yang masih bersifat Suku, Agama, Ras dan Antar golongan ke arah yang lebih demokratis. Agar masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan politik juga bersifat demokratis. Sosialisasi politik adalah merupakan langkah awal dan salah satu indikator di dalam mempengaruhi tercapainya pembangunan politik yang demokratis yang sesuai dengan tujuan dari UU No. 32 Tahun 2004 serta UUD 1945 dan Pancasila. Dengan kata lain sosialisasi politik merupakan landasan pembangunan politik dan juga merupakan mata rantai dalam sistem politik yang demokratis.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan diatas maka penulis mengambil pokok bahasan judul sebagai berikut : “Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Pembangunan Politik di Kabupaten Poso”. Karena penulis bermaksud untuk mencoba memaparkan dan ingin mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi politik dari UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai salah satu unsur Pembangunan Politik yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Poso.

### **Teori dan Konsep**

Menurut Drs. M. Z. Lawang dalam bukunya Pengantar Sosiologi (1995 : 23) mengatakan, sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Contoh sosialisasi yang paling

jasas adalah anak kecil yang diajarkan untuk menghormati orang tuanya, sesamanya, anak kecil yang diberitahu bagaimana cara makan yang sopan, cara duduk, cara berbahasa, anak kecil yang diajarkan untuk menghormati orang lain, berlaku jujur, rajin belajar, rajin beribadah dan lain sebagainya. Semuanya ini memperlihatkan serangkaian norma-norma yang masih berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Mungkin si anak bertanya mengapa kita harus menghormati orang tua? Jawabannya karena orang tua lah yang bertanggung jawab atas kehidupan anak, dan mereka yang sudah memberikan jasanya kepada kita, harus kita junjung tinggi.

Mengapa perlu sosialisasi? Alasan yang utama adalah supaya dengan norma, nilai serta peran yang dimiliki si anak, ia mampu hidup dengan baik dalam masyarakat, atau dengan kata lain kalau mau hidup dengan baik dalam masyarakat, maka nilai dan norma harus dijunjung tinggi, tujuan lain dari sosialisasi adalah supaya masyarakat itu tetap ada dengan semua nilai-nilai serta norma-normanya, sehingga anak-anaknya dapat meneruskannya kalau sekiranya orang tuanya sudah tidak ada lagi. Untuk mengerti dengan lebih baik akan sosialisasi sebagai suatu proses, maka perlu kiranya kita membagi dua macam sosialisasi yaitu :

#### **a. Sosialisasi Primer**

Dari namanya sendiri sudah jelas kiranya, bahwa sosialisasi itu terjadi pada usia anak masih kecil katakanlah 0-4 tahun. Dengan Sosialisasi itu si anak dapat mengenal lingkungannya. Ia mengenal papa, mama, kakek, nenek, kakak, adik, om, tante, teman sebaya dan juga mengenal dirinya sendiri oleh karena itu ia dapat membedakan dirinya dengan orang lain, kalau sekiranya ia dipanggil dengan namanya misalnya Andrew.

#### **b. Sosialisasi Sekunder**

Dari namanya sendiri sudah jelas bahwa sosialisasi sekunder terjadi setelah sosialisasi primer. Malah sosialisasi primer merupakan dasar untuk sosialisasi sekunder dan sebanyak mungkin sosialisasi sekunder mi mencerminkan sosialisasi yang pertama. Kalau yang berperan dalam sosialisasi primer adalah orang tuanya sendiri beserta kakak, adik atau sanak keluarga (seperti lazimnya dalam kehidupan keluarga di Indonesia), malah yang berperan mendidik anak selama

sosialisasi sekunder adalah orang lain. Salah satu contoh adalah sekolah. Di sekolah kita diberi bekal pengetahuan, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk dapat hidup dalam kehidupan yang lebih luas, mengenal Negara, Pancasila dan UUD 1945 dan pengetahuan umum lainnya. Sedangkan kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni "Polis" yang dapat berarti kota atau negara kota. Kata polis tersebut dapat diturunkan kata-kata "Polites" yang berarti warga negara, "Politikos" (nama sifat) yang berarti kewarganegaraan (*civic*), "*Politike techne*" yang berarti kemahiran politik dan "*Politike episteme*" yang berarti Ilmu Politik. Menurut H. Zainal Abidin Achmad (1977 : 46) Politik adalah organisasi tentang kehidupan bersama dalam negara. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo (1982:8) Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dan sistem itu dalam melaksanakan sistem itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dan tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan itu perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipandang baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.

Sementara Miriam Budiardjo dalam bukunya Sosialisasi dan Partisipasi Politik (1982 : 38) secara teoritis mengatakan Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melihat mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

### Konsep Pembangunan Politik

Pada dasarnya Pembangunan Politik memiliki kecenderungan yang tertentu dalam popularisasi ide-ide kemajuan, atau tingkat

kehidupan kenegaraan yang lebih baik dibandingkan dengan masa lalu, misalnya ketika suatu negara berada dalam sistem penjajahan, maupun dalam fase memilih sistem politik yang sesuai dengan kemerdekaan Nasional diperoleh. Masyarakat yang dianggap maju menurut Teori Sosial dan Kebudayaan adalah masyarakat yang modern, dan karena itu sebagaimana diungkapkan Almond ciri-ciri sistem politik yang maju tersebut ada pada masyarakat modern. Karena itu dalam kerangka pembangunan politik mestilah perubahan-perubahan politik menuju kepada cita-cita Modernisasi, dengan ciri-ciri khasnya adalah suatu masyarakat yang hidup dalam ruang lingkup pertanian, sementara masyarakat modern karena berbagai perubahan yang dialaminya berkat perkembangan di sektor teknologi dan industri, adalah masyarakat yang hidup dalam ruang lingkup di sektor industri modern pula.

Juwono Sudarsono, dalam bukunya Pembangunan Politik dan Perubahan Politik mengatakan bahwa Pembangunan adalah Rasionalisasi, Integrasi Nasional, Demokrasi dan Mobilisasi, Pembangunan atau pembaharuan politik juga meliputi :

1. Suatu sistem politik yang ideal yang ingin dicapai.
2. Penilaian bahwa sistem politik yang tengah atau sementara berlaku masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan oleh karena itu perlu diperbaiki atau diperbaharui, (Alfian : 1978).
  - a. Persamaan (*Equality*)
  - b. Pembangunan politik harus betul-betul berkenaan dengan masalah partisipasi dan keterlibatan rakyat dalam kegiatan politik.
  - c. Kapasitas dan Kesanggupan dari suatu Sistem Politik
  - d. Kapasitas berkaitan erat dengan Output sistem politik sehingga sistem politik itu dapat mempengaruhi sistem politik maupun sistem ekonomi.
  - e. Diferensiasi dan Spesialisasi.

Masalah pembangunan politik adalah diferensiasi dan spesialisasi dapat berlaku dalam analisa mengenai lembaga dan struktur. Dengan diferensiasi timbul peningkatan, Spesialisasi fungsional dari berbagai peranan politik dan sistem politik.

## Otonomi Daerah

Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, *outonomous* yang berarti “Pengaturan Sendiri”. Menurut Formulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, otonomi adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.” Pengaturan dan pengurusan tersebut, menurut Pasal 2 (2) Undang-Undang tersebut, harus dilakukan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Apa substansi kebijakan otonomi daerah?

Dalam perspektif Pemerintah Republik Indonesia, ada dua tujuan utama kebijakan otonomi daerah. *Pertama*, “untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Kedua*, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun menurut Hidayat dalam M. Sirozi (2005 : 192) ada tiga alasan strategis penerapan otonomi daerah. *Pertama*, untuk mengembangkan *political equality* (kesadaran politik) guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat daerah dalam rangka demokratisasi dan penyelenggaraan pembangunan. Dominasi pemerintah pusat yang berlangsung jangka waktu yang cukup lama telah menjadikan pemerintahan pusat sebagai supra struktur yang mengatur dan menetapkan segalanya. Sebagian besar sumber daya pemerintahan dan pembangunan terkonsentrasi di pusat dan dikelola serta di kontrol oleh pemerintah pusat. Akibatnya, terjadi ketidaksetaraan (*inequality*) hak, kewajiban, dan tanggung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain membuat pemerintah pusat menjadi terlalu berat, ketidaksetaraan ini juga membuat pemerintah daerah hanya menjadi “pelengkap penderita”.

## METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta memakai metode

deskriptif analisis melalui studi lapangan. Iman Munawir, 1994 mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat deskriptif (penggambaran) mengenai situasi dan kejadian, pendapat tersebut diperjelas oleh Nawawi (1991:63) jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 13015 jiwa sedangkan sampel yang di ambil secara *cluster* adalah 40 orang.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Sosialisasi Politik dalam Pembangunan Politik

Dinamika masyarakat dari tahun ke tahun menjadi potensi kecemburuan sosial dalam masyarakat terutama elit, politisi bahkan kalangan mahasiswa yang berhasil memanfaatkan krisis yang melanda Bangsa Indonesia dengan kekuatan gerakan berbasis massa yang menggelombang sepanjang tahun 1998 pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei. Sepeninggalan Soeharto dari kursi kepresidenan banyak perubahan yang terjadi secara dramatis, dinamika kehidupan politik Indonesia menggelombang. Hal ini dapat dilihat dari maraknya gerakan massa, tumbuhnya partai politik dibuktikan dengan Pemilu tahun 2014, berkembangnya berbagai tuntutan yakni Pemilu tahun 2014, berkembangnya berbagai tuntutan yakni kebebasan dalam berpolitik, dibuktikan dengan keluarnya Paket UU Politik Baru terutama tentang Partai Politik dan Pemilu sehingga menjadi sarana Demokrasi bagi rakyat yang haus akan keadilan, ini juga dapat dilihat dengan munculnya kantong-kantong kristisisme masyarakat, oleh karena dimana-mana terutama di daerah-daerah muncul letupan emosional masyarakat yakni masyarakat dilanda euphoria, tuntutan mereka tak terkendali karena adanya kebebasan masa lalu tersumbat, akibatnya menimbulkan berbagai macam perubahan terutama perubahan-perubahan terhadap pembaharuan hak-hak politik, ledakan partisipasi politik, dan berkembangnya berbagai isu disintegrasi.

Apabila melihat berbagai akar permasalahan yang muncul tersebut di atas, maka berbagai konsekuensi yang turut mempengaruhinya antara lain: berkembangnya ketidakpastian politik, tidak tertatanya sistem pemerintahan dengan baik, dan munculnya berbagai konflik dan kekerasan politik, hal ini dapat dilihat dari suasana kebebasan, munculnya

kepercayaan diri, sehingga berpengaruh terhadap sikap politik rakyat yang tak terkendali.

Melihat kenyataan yang terjadi maka perubahan iklim politik mempengaruhi dinamika kehidupan politik rakyat yakni terjadi gejala perubahan nilai-nilai, norma, tatanan, perilaku dan struktur politik di dalam masyarakat. Adanya perubahan tersebut secara langsung akan mempengaruhi keseimbangan dalam pembangunan terutama dalam kaitan dengan pembangunan politik.

Melihat berbagai kenyataan di atas, maka secara langsung bila dikaitkan dengan dinamika kehidupan politik masyarakat khususnya di Kecamatan Lage. Isu-isu yang marak berlaku di Indonesia maka turut mempengaruhi munculnya berbagai ledakan Politik terutama dalam pelaksanaan Pemilu, lewat Pemilihan Bupati, munculnya isu disintegrasi politik kedaerahan.

Partisipasi politik adalah merupakan hak-hak politik rakyat yang meningkat secara tajam yang sangat berkaitan dengan berbagai perkembangan terjadi di saat pelaksanaan Pemilu. Pemilihan Umum merupakan ciri pokok bagi tegaknya nilai-nilai Demokrasi di suatu negara. Pada dasarnya esensi Pemilihan Umum adalah sebagai Demokrasi untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan kebawah sebagai suatu kewajiban

sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat menurut sistem Permusyawaratan Perwakilan.

Bila melihat pelaksanaan Pemilu yang terjadi di Kecamatan Lage maka ada beberapa hal yang dapat dilihat antara lain :

### **Pengaruh Sosialisasi Politik bagi Masyarakat terhadap Partai Politik**

Keterwakilan politik rakyat tidak semata-mata ditentukan oleh Pemilu tetapi yang lebih penting adalah seberapa jauh Partai Politik dapat memainkan peranannya secara aktif di dalam segenap proses politik bahkan jika dilacak lebih jauh lagi dari sejarah Pemilihan Umum merupakan satu-satunya cara untuk mewadahi keikutsertaan rakyat dalam politik melalui partai politik. Tidak hanya itu Demokrasi pun baru dapat direalisasikan manakala terdapat partai politik dan pemilihan umum. Karakteristik utama dari tujuan partai politik adalah untuk memilih calon, melakukan kampanye dan mengelola pemerintahan. Dengan demikian antara partai politik dan pemilihan umum mempunyai hubungan yang sangat erat sehingga diharapkan kehidupan demokrasi akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan pemilihan umum demokrasi ditegakkan untuk itu harus ada partai politik yang dapat berkompetisi dengan bebas adalah merupakan cerminan masyarakat Demokratis.

**Pengaruh Sosialisasi Politik Yang Dilakukan Oleh Partai Politik Terhadap Masyarakat**

| <b>o.</b> | <b>Pernyataan</b>  | <b>Responden</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1         | Berpengaruh        | 27               | 67,5                  |
| 2         | Cukup berpengaruh  | 9                | 22,5                  |
| 3         | Kurang berpengaruh | 4                | 10                    |
|           | <b>Jumlah</b>      | <b>40</b>        | <b>100</b>            |

*Sumber: Hasil data olahan 2014*

Dari Tabel di atas responden mengatakan bahwa pengaruh sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap masyarakat berjumlah 27 orang (67,5%), 9 orang (22,5%) menyatakan cukup berpengaruh, sedangkan 4 responden (10%) menyatakan kurang berpengaruh.

### **Pengaruh Sosialisasi Politik terhadap Sikap Masyarakat dalam Menerima Partai Politik**

Dengan adanya tuntutan rakyat untuk melakukan Reformasi di segala bidang yang berdampak pada tumbangannya kepemimpinan Orde Baru, maka rakyat kembali bergairah dan

turut serta berkiprah dalam kehidupan politik untuk membangun Indonesia Baru.

Untuk itulah partai-partai politik peserta Pemilu 2004 bekerja keras untuk mensosialisasikan tanda gambar, nomor partai dan tujuan partai kepada masyarakat umum. Secara teoritis sikap masyarakat berpengaruh menentukan pilihannya pada satu partai tertentu harus mengetahui betul seluk-beluk partai politik yang hendak dipilih. Masyarakat harus tahu visi dan misi partai, mengetahui platform partai serta mempengaruhi program-program partai politik, di samping itu secara teori pula masyarakat tidak asal memilih mengingat konsekuensi dari pilihan itu sangat menentukan nasib anak bangsa di Republik ini, karena pemilihan umum pada hakekatnya adalah memperbaharui pemerintahan.

Hingga hari pemungutan dan perhitungan suara 7 Juni 1999 sebagian besar masyarakat di daerah ini baru pada tahap mengenali nama partai, nomor partai, dan lambang partai yang sudah dipublikasikan secara luas baik melalui media massa, spanduk, bendera-bendera dan melalui tempelan-tempelan pada dinding.

Kenyataan sikap masyarakat terhadap partai politik di dominasi empat partai politik yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKP, Partai lainnya yang sudah cukup akrab di depan publik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kehadiran partai politik terkesan sangat tergesa-gesa dan tidak dapat mensosialisasikan keseluruhan karakter partai, program partai, platform partai dan agenda perjuangan partai yang tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kendala-kendala yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam kaitannya dengan kehadiran partai-partai politik cukup kompleks antara lain seperti : pengenalan program-program partai, asas serta visi dan misi perjuangan partai politik walaupun sudah dijelaskan oleh juru kampanye dan melalui media massa, hal ini tidaklah mudah dikenali dan dipahami karena pidato maupun orasi dari kader-kader partai politik hanya selintas dikemukakan, hal tersebut membuat masyarakat kelas bawah sulit memahami demikian menurut salah satu tokoh masyarakat oleh karena itu waktu yang sangat sempit, maka jalan pintas yang digunakan masyarakat sebagian besar mengenali partai

politik peserta Pemilu 2014 yang melalui gambar-gambar dan bendera partai yang cukup marak di pajang di tempat-tempat strategis, disamping itu masyarakat mengenali partai politik melalui arak-arakan partai politik yang berkampanye. Harapan-harapan untuk menjadikan pemilihan rasional tidak hanya sosialisasi sebatas bendera, gambar, atau arak-arakan di jalanan, pada hakekatnya untuk mempengaruhi dan membentuk sikap politik dari masyarakat dibutuhkan waktu yang lama bagi masyarakat untuk mengerti memahami dan makin menghayati lebih dalam masing-masing partai politik.

Selanjutnya, sikap masyarakat tentang kehadiran partai politik, di daerah ini umumnya masyarakat (para informan) memberikan tanggapan bahwa semua partai politik peserta Pemilu 2014 adalah reformis, dalam arti semua partai politik mempunyai komitmen untuk melaksanakan agenda reformasi. Bahkan yang menarik pernyataan dari salah satu informan bahwa Partai Golongan Karya adalah Partai Politik yang paling reformis karena Partai Golkar paling banyak di kritik sehingga partai Golkar berusaha untuk mengikuti perubahan.

Masyarakat beranggapan bahwa kehadiran dari berbagai partai pada umumnya membingungkan bagi masyarakat sendiri. hal tersebut disebabkan karena kehadiran partai politik dengan proses penyelenggaraan pemilu terlalu singkat, maka untuk menentukan pilihan, masyarakat lebih cenderung melihat pemimpin yang diunggulkan oleh Partai Politik tertentu.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis dapat mencermati tentang sikap masyarakat dalam menerima partai politik antara lain :

- a. Masyarakat khususnya pada pemilih dengan kehadiran multi partai umumnya menjadi bingung untuk menerimanya.
- b. Para pemilih memiliki sikap untuk menerima partai politik berdasarkan Figur yang diunggulkan partai politik tertentu.
- c. Karena jarak antara kehadiran partai politik dengan proses penyelenggaraan pemilu terlalu singkat, maka jalan pintas yang digunakan sebagian besar masyarakat untuk mengenali partai politik peserta Pemilu 2014 yakni melalui gambar-gambar, bendera-bendera partai yang cukup marak dipajang di tempat-tempat strategis serta melalui arak-arakan partai politik yang berkampanye.

## Pengaruh Sosialisasi terhadap Sikap Masyarakat dalam Memilih Partai

| No. | Pernyataan         | Responden | Persentase (%) |
|-----|--------------------|-----------|----------------|
| 1   | Berpengaruh        | 31        | 77,5           |
| 2   | Cukup berpengaruh  | 6         | 15             |
| 3   | Kurang berpengaruh | 3         | 7,5            |
|     | <b>Jumlah</b>      | <b>40</b> | <b>100</b>     |

*Sumber: Hasil data olahan 2014*

Dari Tabel di atas mengatakan bahwa pengaruh sosialisasi terhadap sikap masyarakat dalam memilih partai ada 31 orang (77,5%) menjalankan sosialisasi politik berpengaruh terhadap sikap masyarakat dalam memilih partai, sedangkan 6 orang (15%) menyatakan cukup berpengaruh, dan 3 orang (7,5%) menyatakan kurang berpengaruh.

#### Pengaruh Sosialisasi Politik Dalam Pelaksanaan Pemilu

Pemilihan umum tahun 2014 merupakan momentum yang sangat strategis bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan kehidupan berpolitik secara demokratis. Selain itu pemilu yang berdemokratis ini adalah pemilu-pemilu sebelumnya karena itu sambutan masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemilu begitu besar dan lebih antusiasnya masyarakat dalam kehidupan berpolitik, walaupun mungkin pada

pelaksanaan pemilu 2014 terdapat perbedaan-perbedaan pendapat maupun meningkatnya suhu politik tetapi semuanya telah dapat dilalui dengan baik buktinya proses pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara demokratis dan pada proses pemungutan dan perhitungan suara dapat berlangsung secara bebas, langsung, umum dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).

Hal yang paling menarik untuk disimak pada pemilu yang lalu berdasarkan anggapan yang dilakukan oleh beberapa pengamat tentang proses penyelenggaraan pemilu 9 Juli 2014 akan terjadi berbagai konflik seperti kerusuhan, kekacauan dan kendala-kendala lain, ternyata pada pelaksanaan pemilu 9 Juli 2014 khususnya di lokasi penelitian dapat berlangsung sesuai dengan yang dikehendaki yakni dapat berlangsung dengan baik, aman, tertib dan lancar. Hal ini sangat dipengaruhi oleh karena adanya sosialisasi politik yang baik

#### Pengaruh Sosialisasi Politik terhadap Ikut sertanya Rakyat dalam Pemilu

| No. | Pernyataan         | Responden | Persentase (%) |
|-----|--------------------|-----------|----------------|
| 1   | Berpengaruh        | 25        | 62,5           |
| 2   | Cukup berpengaruh  | 11        | 27,5           |
| 3   | Kurang berpengaruh | 4         | 10             |
|     | <b>Jumlah</b>      | <b>40</b> | <b>100</b>     |

*Sumber : Data hasil olahan 2014*

Berdasarkan Tabel di atas mengatakan bahwa pengaruh sosialisasi politik terhadap ikut sertanya rakyat dalam pemilu ada 25 orang (62,5%), berpengaruh sosialisasi politik terhadap ikut sertanya rakyat dalam pemilu, 11 orang (27,5%) menyatakan cukup berpengaruh,

sedangkan 4 orang (10%) menyatakan kurang berpengaruh. Dikatakan sangat berpengaruh karena partai menginginkan agar semua masyarakat yang sudah cukup umur, merupakan suatu kewajiban untuk mengikuti pemilihan umum.



### Pengaruh Sosial Politik terhadap Isu Politik yang Berkembang

Masyarakat kalangan bawah di daerah ini menganggap bahwa partai politik yang menang pada pemilu umum 2014 itulah yang akan menjadi Presiden nanti. Hal ini disebabkan masyarakat kalangan bawah belum tahu betul tentang mekanisme pemilihan presiden di Republik ini. Yang menentukan pemilihan presiden adalah anggota MPR. Anggota MPR adalah terdiri atas anggota DPR yang terdiri atas anggota partai politik hasil pemilihan umum sebanyak 462 orang dan anggota TNI-POLRI yang diangkat sebanyak 38 orang ditambah dengan Utusan Daerah sebanyak 135 orang yaitu 5 (lima) orang dari setiap Daerah Propinsi dan Utusan Golongan sebanyak 65 orang. (UU No. 4 Tahun 1999 tentang SUSDUK MPR, DPR dan DPRD).

Karena menganggap bahwa partai politik pemenang pemilu yang akan menjadi Presiden, maka banyak anak bangsa mengharapkan wakil dari PDI Perjuangan-lah yang akan menjadi presiden.

Ada manuver-manuver politik yang dilakukan oleh kalangan "Elit-elit Politik" sangat membingungkan masyarakat. Seperti dengan berdirinya Poros tengah dan Poros Nasional Pasca Pemilu 2014. Namun demikian sebagian besar masyarakat mengharapkan wakil-wakil Rakyat di MPR menjalankan tugas Nasional dan membawa aspirasi serta keinginan rakyat untuk menjaga Persatuan dan Kesatuan Nasional dan tidak mementingkan kepentingan Golongan atau Kelompok. Hanya dengan kesadaran dan sikap-sikap seperti itu menurut pendapat beberapa informan dapat menghindari perpecahan Nasional.

Pengaruh Sosialisasi Politik terhadap Isu yang Berkembang

| No. | Pernyataan         | Responden | Persentase (%) |
|-----|--------------------|-----------|----------------|
| 1   | Berpengaruh        | 31        | 77,5           |
| 2   | Cukup berpengaruh  | 6         | 15             |
| 3   | Kurang berpengaruh | 3         | 7,5            |
|     | <b>Jumlah</b>      | <b>40</b> | <b>100</b>     |

Sumber : Data hasil olahan 2014

Dari Tabel di atas, mengatakan pengaruh sosialisasi politik terhadap isu yang berkembang bahwa berpengaruh ada 31 orang (77,5%), ada 6 orang (15%) menyatakan cukup berpengaruh, dan 3 orang (7,5%) menyatakan kurang berpengaruh. Dengan demikian pengaruh sosialisasi politik terhadap isu-isu yang berkembang akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat.

Memang hal seperti itu diilhami bahwa berkembangnya berbagai aspirasi politik dipengaruhi oleh adanya berbagai sarana sosial, adanya sarana budaya di dalam masyarakat, perbedaan letak geografis, bahasa, agama, ideologi, norma-norma, tatanan, membentuk jaringan komunikasi dan memiliki perbedaan ciri khas kelompok.

Daniel Mohan juga mengatakan bahwa dalam komunitas masyarakat selalu ada etnik dan di dalam pembentukan etnik maka dapat memunculkan adanya ketidakpuasan.

Barth dalam bukunya menuntaskan perubahan catatan politik (1956:23) mengatakan bahwa bila suatu kelompok etnik mampu menguasai suatu sarana produksi dari kelompok lain maka akan terjadi hubungan yang tidak serasi dan terjadi penggolongan (standartifikasi) masyarakat.

Menurut Harald Eidheim dalam bukunya sosiologi suatu pengantar (1968:36) mengatakan bahwa masalah pembatasan kelompok etnik sebagai salah satu unit budaya yang kontrak, dalam kelompok etnik juga merupakan pengelompokan sosial yang memberikan dasar status asal, sehingga hubungan antar etnik

tersebut memberikan dasar status asal, sehingga hubungan antar etnik tersebut tertata sesuai dengan status tersebut. Suatu contoh yang paling praktis menurut beliau bahwa dengan tidak tertatanya ciri etnik (status), maka tidak akan nampak sebagai perilaku antar etnik yang

### **Relevansi Sosialisasi Politik dalam Pembangunan Politik**

Dalam GBHN 1999 dikatakan bahwa berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila tergantung kepada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental dan tekad serta semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian setiap warga negara dituntut dua hal penting yang harus dihayati serta diamalkan agar tujuan pembangunan nasional akan tercapai, di satu pihak rakyat dituntut untuk berpartisipasi aktif, di pihak lain para penyelenggara negara dituntut sikap mental yang baik serta mampu mencapai pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu upaya pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang sedang digalakkan sekarang ini adalah pembangunan di bidang politik. Pembangunan di bidang politik diarahkan pada pemantapan kehidupan dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bagi seluruh warga negara Indonesia sehingga terjamin usaha mencapai tujuan nasional.

Dalam rangka ini Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka memantapkan pertumbuhan Demokrasi Pancasila maka diperlukan pula peningkatan kesadaran masyarakat dengan melalui pendidikan politik. Karena tidak semua warga negara Indonesia yang selalu mentaati akan hak dan tanggung jawabnya dalam berbangsa dan bernegara. Landasan utama dan yang terutama dalam rangka pendidikan politik bagi segenap masyarakat Indonesia adalah Sosialisasi Pancasila dan UUD 1945, demi terciptanya suasana dan harapan yang sesuai dengan cita-cita, kemerdekaan bangsa kita. Disamping itu usaha untuk lebih memasyarakatkan Pancasila sebagai falsafah dan Ideologi Nasional serta UUD 1945 tersebut adalah jawaban atas tantangan masa depan khususnya bagi bangsa dan negara serta

terlembaga. Ketidacocokkan peran etnik mempunyai proses pengambilan peran.

Namun apabila dikaji lebih dalam berdasarkan teori maka menurut pemahaman yang mendasar menyebabkan masyarakat di Kecamatan Lage menyampaikan aspirasi politik yang membangun kehidupan masyarakat. masyarakat Indonesia. Mengingat berbagai tragedi nasional yang sering terjadi dimana-mana dari masa lampau sampai sekarang ini. Sebagian masyarakat belum menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting sebagai landasan dalam memperkuat ketahanan nasional. Apabila pendidikannya lemah, maka akan mempengaruhi pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula mempengaruhi pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula dengan pendidikan politik. Pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan pembangunan di bidang politik yang dilakukan oleh pemerintah maka diharapkan setiap masyarakat akan dapat menyadari sepenuhnya keberadaan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Pengaruh Peningkatan Sosialisasi Politik terhadap Pembangunan Politik**

Keberhasilan pembangunan nasional tergantung pada peran aktif masyarakat serta pada sikap mental, tekad dan semangat serta ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan pembangunan ini tidak semata-mata tergantung pada usaha pemerintah saja, tetapi lebih dari itu haruslah diimbangi dengan partisipasi seluruh anggota masyarakat secara penuh dalam pembangunan.

Pembangunan yang sedang digalakkan sekarang ini menuntut pula pembangunan di bidang politik yang dapat dipertanggungjawabkan dalam arti pelaksanaannya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga dapat mencerminkan demokrasi Pancasila. Pembinaan politik diarahkan pada sikap keterbukaan dimana rakyat diberikan kesempatan sebanyak mungkin untuk menyalurkan partisipasi politiknya secara wajar yang sesuai dengan demokrasi Pancasila.

Pembinaan politik memungkinkan peran aktif masyarakat dalam berpartisipasi politik. Kesadaran rakyat bernegara secara konkrit adalah merupakan wujud nyata partisipasi politik rakyat dimana secara aktif pula terlibat dalam usaha-usaha pembangunan disegala bidang.

Sosialisasi politik akan nampak pengaruhnya dalam pelaksanaan partisipasi politik. Peranan

nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat tentunya harus dapat dimanfaatkan keberadaannya, karena proses sosialisasi politik ini merupakan dasar yang amat kuat di dalam berperilaku politik dalam masyarakat. Tingkah laku politik yang mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan diharapkan dapat terus terpelihara. Hal ini tentunya didapat lewat dukungan dari proses sosialisasi politik. Iklim pembinaan politik yang tidak sehat dan struktur politik yang tidak berfungsi dengan baik merupakan hambatan dalam menciptakan iklim politik yang sehat dan dinamis.

Sarana sosialisasi politik merupakan kunci yang menentukan kehidupan politik masyarakat dengan termemanfaatkannya sarana-sarana itu dengan sendirinya nilai-nilai, norma-norma dan moral politik dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dapat dipertahankan.

Bila diamati keadaan sosialisasi politik sebagai suatu proses pembentukan nilai-nilai, norma-norma dan perilaku politik masyarakat, di wilayah Kecamatan Lage belum dapat diupayakan secara maksimal sebagai landasan dalam keterlibatan berpartisipasi politik dalam pembangunan. Dalam sekolah juga masih dapat dilihat kurangnya kegiatan ekstra diluar sekolah yang langsung dikontrol oleh guru, sehingga banyak kegiatan yang dilakukan hanya berdasarkan inisiatif sendiri ataupun kelompok

yang seringkali tidak sesuai lagi dengan apa yang didapat di sekolah. Banyaknya nilai-nilai negatif yang disampaikan oleh media massa serta adanya sebagian pihak yang memanfaatkan media massa ini untuk menghasut masyarakat dengan membesar-besarkan kelemahan pemerintah dan mengganggu ketentraman masyarakat. Kurangnya kontrol terhadap media massa yang ada haruslah segera diperbaiki serta pengawasan terhadap terpaan media massa harus lebih diaktifkan, baik memberikan pengertian mengenai informasi yang ada serta diperlukan peranan orang tua dalam mengontrol anak-anaknya dalam hal tayangan-tayangan yang condong tidak sesuai dengan kehidupan demokrasi Pancasila.

Kesemuanya ini dituntut kerjasama dari semua pihak dan baik dalam kalangan keluarga, sekolah, lingkungan sosial, serta keberadaan media massa dalam kegiatan sehari-hari haruslah dikontrol agar penyerapan nilai-nilai, norma-norma dan perilaku politik yang ada sesuai dengan Pancasila. Masalah-masalah yang sudah disebutkan diatas kiranya perlu diperhatikan dalam usaha peningkatan sosialisasi politik masyarakat agar dapat mempengaruhi akan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan politik. Hal ini juga merupakan tanggung jawab dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang ada di Kecamatan Lage.

#### Pengaruh Peningkatan Sosialisasi Politik Terhadap Pembangunan Politik

| No. | Pernyataan         | Responden | Persentase (%) |
|-----|--------------------|-----------|----------------|
| 1   | Berpengaruh        | 27        | 67,5%          |
| 2   | Cukup berpengaruh  | 8         | 20%            |
| 3   | Kurang berpengaruh | 5         | 12,5%          |
|     | <b>Jumlah</b>      | <b>40</b> | <b>100%</b>    |

*Sumber : Data hasil olahan 2014*

Dari Tabel di atas mengatakan pengaruh peningkatan sosialisasi politik terhadap pembangunan politik berpengaruh ada 27 orang (67,5%), 8 orang (20%) menyatakan peningkatan sosialisasi politik cukup berpengaruh dalam pembangunan politik, dan 5 orang (12,5%) menyatakan peningkatan sosialisasi politik kurang berpengaruh dalam pembangunan politik. Ini menandakan bahwa pengaruh peningkatan sosialisasi politik terhadap pembangunan politik

sangat penting agar masyarakat nantinya sudah dapat menyesuaikan dirinya untuk proses-proses mengenai partisipasi politik atau dalam agenda pemilihan umum/pilkada kedepan.

#### A. Kesimpulan

Akhirnya penulis ingin memaparkan/ menyimpulkan berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas :

- a. Perubahan iklim politik secara langsung turut mempengaruhi dinamika kehidupan politik rakyat diantaranya adalah adanya ledakan partisipasi politik, isu disintegrasi dan berbagai pokok persoalan lainnya.
- b. Salah satu bentuk nyata dalam demokrasi adalah menempatkan reformasi politik sebagai jalan untuk menuju perubahan. Salah satu bentuk perubahan nyata dari reformasi politik adalah maraknya gerakan massa, munculnya kantong kritisisme dimana-mana, diubahnya paket UU di bidang politik, tumbuhnya partai politik dalam pemilu, serta munculnya berbagai konflik dan kekerasan politik.
- c. Dampak demokratisasi tidak selamanya membawa angin segar dalam kehidupan berpolitik, hal ini ditandai dengan tuntutan kedaerahan yang dianggap sebagai arogansi masyarakat daerah dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Sikap arogansi masyarakat daerah dapat dilihat dari pemunculan kantong-kantong krisistisme. Adanya kantong-kantong krisistisme ini juga memunculkan isu disintegrasi politik, diantaranya kewenangan masyarakat untuk memisahkan diri dari daerah lain.
- d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ledakan partisipasi politik adalah menyangkut hak-hak politik rakyat yang telah meningkat secara tajam dapat dilihat dari pelaksanaan Pemilu. Pelaksanaan pemilu yang di lakukan di Kecamatan Lage merupakan suatu dinamika munculnya ledakan partisipasi politik, sikap rakyat dalam menerima partai, kemampuan pimpinan menggalang massa, tampilnya para pemilih pemula yang ikut ambil bagian dalam kehidupan politik, dan berbagai dinamika kehidupan politik lainnya.
- e. Ledakan partisipasi politik juga cukup meningkat secara tajam dapat dilihat dari adanya pemilihan Camat pada beberapa periode lalu.
- f. Dalam pelaksanaan pembangunan politik yang berkaitan dengan sosialisasi politik rakyat cukup mengalami kemajuan dan berbagai perubahan terutama dalam menyampaikan berbagai aspirasi politik lewat lembaga legislatif. Masyarakat di daerah ini sudah dapat memahami berbagai saluran-saluran politik yang dilakukan. Sebuah negara demokrasi sosialisasi politik melalui sarana komunikasi politik memegang peranan penting. Hal ini dimaklumi karena tanpa komunikasi politik

maka rakyat tidak akan dapat berbuat banyak dalam menyampaikan dan menyalurkan berbagai aspirasi dan kepentingan politik. Komunikasi politik pada dasarnya menjadi sarana pembangunan politik, sarana partisipasi, sarana dalam menyampaikan berbagai aspirasi, serta sarana dalam pendewasaan masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

## B. Saran

- a. Hendaknya pemerintah kecamatan Lage lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan politik yang lebih baik dan lebih bermakna terutama perlu melaksanakan berbagai macam sosialisasi, seminar, diskusi, temu kader dalam kaitan dengan perlunya peningkatan partisipasi politik rakyat.
- b. Hendaknya pembangunan politik yang terjadi dewasa ini lebih disikapi secara arif dan bijaksana dengan menggunakan akal sehat serta pikiran yang jernih guna menghindari salah kaprah terhadap reformasi yang sedang berkembang dewasa ini di Indonesia.
- c. Mengingat gaung reformasi sedang berjalan dan turut mempengaruhi dinamika kehidupan politik masyarakat maka hendaknya pembangunan politik ditingkatkan sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku di dalam masyarakat.
- d. Di dalam menyalurkan aspirasi politik, masyarakat diharapkan memperhatikan aspek hak azasi manusia yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku sehingga dapat tercipta suatu kehidupan politik dan terutama kehidupan berdemokrasi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, 1978. *Pembaharuan dan Perubahan Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- , 1985. *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, Angkasa Bandung.
- , 1986. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Kumpulan Karangan Gramedia Jakarta.
- Astrid Phil S. Susanto, Dr. 1982. *Komunikasi Massa*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

- , 1987. **Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial**. Penerbit CV. Rajawali Jakarta.
- Daldjoeni, Drs., 1993. **Geografi Sosial**. Penerbit YISS.
- Faisal Sanafiah, 1993. **Format Penelitian Ilmu-ilmu Sosial**, Penerbit Rajawali Press.
- Farchan Bulkin, 1988. **Analisa Kekuatan Politik di Indonesia**, Penerbit LP3ES Jakarta.
- Fatah Saefullah EEP, 1998. **Bangsa Saya Yang Menyebarkan**, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- , 2000, **Menuntaskan Perubahan Catatan Politik Tahun 1998-1999**, Mistan Pustaka, Bandung.
- Gafar. Afan. 1989. **Beberapa Aspek Pembangunan Politik**. Penerbit Rajawali Press.
- H. Zainal Abidin Achmad, 1977. *Ilmu Politik*. Rineka Cipta.
- Isjwara F. SH., 1980. **Pengantar Ilmu Politik**. Bina Cipta Bandung, Cetakan Ketujuh.
- Kartini Kartono, 1990. **Sosialisasi dan Partisipasi Politik**. Penerbit LP3ES Jakarta.
- Mallassis Louis, 1986. **Dunia Pedesaan**. Penerbit Yayasan Dharma Karya Jakarta.
- Maurice Duverger, 1983. **Partisipasi Politik**. Penerbit CV. Indayu.
- Michael Rush dan Philip Altoff, 1986. **Pengantar Sosiologi Politik**. CV. Rajawali Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1982. **Pengantar Ilmu Politik**. Penerbit PT. Gramedia Jakarta.
- , **Dasar-dasar Ilmu Politik**. Penerbit PT. Gramedia Jakarta.
- Mochtar Mas'oeed dan Colin Mac. Andrews, 1984. **Perbandingan Sistem Politik**. Gajah Mada University Press Yogyakarta.
- Muhaimin Yahya dan Colin Mc. Andrews, 1981. **Masalah-masalah Pembangunan Politik**, Penerbit Gajah Mada University Press.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, 1987. *Sosiolog*. Edisi Keenam. Penerbit Erlangga.
- Plano Jack C., dkk., 1994. **Kamus Analisa Politik**, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Robert M. Z. Lawang, Drs., 1985. **Pengantar Sosiologi**. Buku Materi Pokok Universitas Terbuka.
- Rusadi Kanta Prawira, SH., 1992. **Sistem Politik di Indonesia**. Penerbit Sinar Mas Jakarta.
- Sarundajang, SH, 2000, **Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah**, Pustaka, Sinar Harapan, Jakarta.
- Soekanto Soejono, 1987. **Sosiologi Suatu Pengantar**. Rajawali Press Jakarta. Cetakan Ketiga.
- Sorozi, M., 2005, **Politik Pembangunan: Dinamika Hubungan Antar Kepentingan kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subakti Ramlan, 1982. **Memahami Ilmu Politik**. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta, Cetakan Pertama.
- Sudarsono Juwono, 1982. **Politik dan Pembangunan**, Rajawali Jakarta.
- Sumber-sumber lain :**
- Undang-Undang Dasar 1945
  - Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik